

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Islam

Ada dua aspek pemahaman Islam, linguistik dan terminologis. Dari segi bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab, dari kata salima yang berarti keamanan, kedamaian, kedamaian. Juga, itu mengambil bentuk aslama, yang berarti menyerah pada perdamaian. Menurut Maulana Muhammad Ali ayat 202 dari teks Allah SWT Al Baqarah, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman,” masuklah Islam secara utuh dan janganlah mengikuti jejak setan, yang sesungguhnya adalah musuh yang sejati. Untukmu”

Hal ini juga dapat dipahami dari ayat 61 Surat al-Anfal, yang artinya:

*“Jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka mereka cenderung kepada perdamaian dan takut kepada Allah.” Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Mengetahui”*¹

Islam adalah agama universal dengan kekayaan ilmiah yang kaya. Kekayaan ini telah melahirkan pemikir-pemikir Islam interdisipliner. Filsafat, kedokteran, ilmu pasti, biologi, luar angkasa, dan banyak lagi. Disiplin yang berbeda ini adalah ilmu dari mana banyak pemikir telah lahir. Para pemikir ini menelurkan berbagai corak pemikiran, mulai dari liberalisme dan moderasi hingga pemikiran politik dasar Islam. Perkembangan falsafah Islam yang berbeda ini didorong oleh beberapa keinginan, seperti memahami dan menerima naluri hukum, mencari solusi untuk masalah kontemporer, menyesuaikan ajaran Islam dengan ide-ide asing, memurnikan keyakinan, dan mempertahankan prinsip-prinsip Islam.²

Islam adalah agama hukum. Allah SWT mengungkapkan hukum-hukum agama melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan oleh umat Islam tanpa kecuali dan tanpa pengurangan apapun. Oleh karena itu, ciri fundamental Islam adalah pandangan

¹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara Agama dan Kebudayaan*, Cet. II, Depok, Desa-tata, 2001), h. 101

² Mugiyono, *Perkembangan Pemikiran Islam dan Peradaban Islam Perspektif Sejarah*, (2013), h. 5.

normatif yang orientasinya sepenuhnya legal dan formal. Islam haruslah diterima secara utuh, dalam arti seluruh hukum-hukumnya dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat pada semua tingkatan.³

2. Ciri-ciri Ajaran Islam

Lima ciri ajaran Islam yang sangat penting bagi kita:

a. Robbaniyyah (sifat suci).

Allah SWT adalah Rabbul Alamin juga dikenal sebagai Rabbun Nas dan banyak lainnya. Jika Islam bercirikan Robbaniyyah, berarti Islam adalah agama yang diilhami oleh Allah daripada manusia, dan Nabi Muhammad tidak menciptakan agama ini, melainkan hanya mengomunikasikannya.

Oleh karena itu, ia berbicara dalam kapasitas seorang nabi sesuai dengan wahyu yang Allah katakan dalam ayat 3-4 dari Al-Qur'an: hanya wahyu yang turun. Jadi kemurnian ajaran Islam terjamin karena Allah telah menjamin kemurnian apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hijr 9 yang artinya:

"Kami memang mengirim Al-Qur'an dan kami melestarikannya."

Juga, umat Islam tentunya harus mengakui Allah SWT sebagai Rabb dan menanggung segala konsekuensinya, yaitu mengabdikan kepada-Nya saja, sehingga bisa lepas dari kepemilikan. Menjadi Rabbani dalam arti nilai-nilai sikap dan tindakan Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah ke-79.

"Kepada manusia, Allah memberinya kebijaksanaan dan kitab Nabi, lalu dia berkata kepada manusia: 'Kamu harus menjadi penyembahku dan bukan penyembah Allah, tetapi dia Mengatakan , "Jika Anda menjadi rabi karena Anda selalu mengajarkan Al kitab dan terus mempelajarinya".⁴

b. Insaniyyah (sifat manusia)

Karena Islam adalah satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang diturunkan kepada umat manusia. Pada dasarnya tidak ada satu ajaran Islam yang bertentangan dengan jiwa manusia. Pada hakekatnya, tidak

³ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara Agama dan Kebudayaan*, Cet. II, Depok, Desa-tata, 2001), h. 105

⁴ Hayana Liswi, *Kebutuhan Manusia Terhadap Agama*, h. 216

ada satupun ajaran dalam Islam yang bertentangan dengan jiwa manusia. Misalnya, seks adalah kecenderungan untuk melampiaskan jiwa manusia, maka Islam tidak mengingkari seksualitas manusia selama tidak bergumul dengan pelajaran Islam itu sendiri. Pada prinsipnya manusia cenderung lebih mengutamakan harta tahta wanita dan segala hal duniawi yang kesemuanya tidak dilarang dalam Islam tetapi harus diimbangi dengan apa yang Allah firmankan tentang kenikmatan dalam surah Al-Qashash 77 yang artinya:

“Tanah apa yang dicari. Allah akan memberimu di akhirat, jangan lupa bagianmu di dunia ini dan berbaik hatilah kepadamu seperti yang telah Allah lakukan kepadamu dan jangan melakukan hal buruk kepadamu di bumi ini. Benar, Allah tidak menyukai orang yang berbuat jahat”.

c. Shumuria (Umum)

Islam adalah agama yang lengkap, tidak hanya mengutamakan satu aspek kemudian mengabaikan aspek lainnya. Integritas ajaran Islam dapat dilihat dalam konsep-konsep Islam di semua bidang kehidupan, mulai dari urusan pribadi, keluarga sipil hingga urusan negara dan bangsa.

Ajaran Islam adalah syamil mutakalim (kesempurnaan dan keadilan). Shumuliyahan Islam berarti kesempurnaan Islam. Ajaran Islam mencakup segala usia, kehidupan dan keberadaan manusia secara setara. Dia mengendalikan urusan pribadi, keluarga, sipil dan bahkan negara. Islam juga menguasai masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, keamanan, pembelajaran dan kedaerahan.⁵

Kegembiraan Islam bukan hanya karena ajarannya yang sehat dan mudah dipraktikkan, tetapi ajaran Islam harus dilestarikan dengan cara-cara Islami. Itu sebabnya kami menemukan konsep misi seperti "jihad" dalam Islam. Allah berfirman dalam Surat An-Nahl 89:

*“Kami telah mengirimkan kepadamu kitab ini yang menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”*⁶

⁵ Hayana Liswi, *Kebutuhan Manusia Terhadap Agama*, h. 218

⁶ Agung Sasongko., *Syumuliyatul Islam*, (Jakarta: Republika, 2019), h. 10

d. Al Waqi'iyah (dapat dicapai).

Al waqi'iyah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dapat diamalkan oleh manusia atau yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan ciri lain dari ajaran Islam. Islam dapat dipraktikkan oleh orang-orang dari semua latar belakang — kaya dan miskin, pria dan wanita, dewasa, remaja, anak-anak, berpendidikan dan berpendidikan rendah, bangsawan, rakyat jelata, orang-orang dari berbagai suku dan adat istiadat, dll. Selain itu, Islam adalah satu-satunya agama yang mampu menghadapi dan mengatasi pengaruh negatif modernitas. Islam sendiri tidak bertentangan dengan kenyataan ini. Hal ini menyiratkan bahwa Islam adalah agama yang tidak was-was dengan kemajuan zaman.⁷

e. Al Wasathiyah (moderat).

Di dunia ini, beberapa agama hanya menekankan isu-isu tertentu. Beberapa orang memprioritaskan masalah materi daripada masalah spiritual dan sebaliknya. Yang lain lebih menekankan pada aspek logis daripada perasaan dll. Allah SWT menyebutkan bahwa seorang Muslim adalah Wasatan yang menjaga keseimbangan dalam perbuatan baik, termasuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta kebutuhan rohani.⁸

Manusia memang membutuhkan konsep agama yang seimbang karena tawazun adalah sunnatullah. Di alam semesta ini, ada siang dan malam, gelap dan terang, hujan dan panas, dll, sehingga keseimbangan kehidupan ini dapat dipertahankan. Dalam hal aqidah, misalnya, banyak agama yang mensyaratkan kehadiran Tuhan dalam beberapa hal agar pemeluknya dapat membuat simbol berupa patung. Ada juga agama yang melihat Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak, jadi pertanyaan tentang ketuhanan hanyalah ilusi, dan beberapa orang bahkan tidak percaya bahwa Tuhan seperti komunisme itu ada. Konsep Islam adalah bahwa Tuhan itu ada, tetapi mata kita tidak dapat melihat keberadaannya. Hal yang sama berlaku untuk masalah lain seperti ibadah, etika, hukum, dll.⁹

⁷ Hayana Liswi, *Kebutuhan Manusia Terhadap Agama*, h. 218

⁸ Hayana Liswi, *Kebutuhan Manusia Terhadap Agama*, h. 217.

⁹ Azyumardi Azra, *Relevansi Islam Wasathiyah*, h. 21

3. Islam dalam Konteks Politik

a. Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid

Latar sosial Abdurrahman Wahid yang lahir dan dibesarkan dalam kalangan pesantren menjadi wajar bila ia kemudian mengawali perjalanan intelektualitasnya yang tidak pernah lepas dari kultur tersebut. Hampir semua perjalanan intelektualitas Abdurrahman Wahid selalu bersentuhan dengan pengaruh pesantren atau dalam banyak hal pemikiran-pemikiran sosial keagamaan. Berbagai bentuk pengalaman hidupnya yang cukup unik telah ikut mengantarkan proses pematangan pemikiran dan pengembangan intelektualnya secara mendalam.¹⁰

Abdurrahman Wahid termasuk tokoh intelektual yang memiliki pandangan dan pemikiran yang berwawasan ke depan. Gagasan-gagasannya seperti pribumisasi Islam di Indonesia, penghormatan terhadap hak-hak kaum minoritas, reformasi kultural, demokratisasi, dan juga toleransi keberagaman merupakan sejumlah contoh tema aktual yang selalu ditawarkan dalam berbagai kesempatan.¹¹

Abdurrahman Wahid juga tokoh yang selalu membuat berita. Wacana-wacana politik di Tanah Air, rasanya kurang lengkap bila tidak disertai tanggapan atau komentar Abdurrahman Wahid. Dalam setiap kesempatan dia sering diminta wartawan baik wartawan domestik maupun luar negeri, untuk menanggapi atau mengomentari diskusi-diskursus politik yang hangat dan aktual. Abdurrahman Wahid sendiri bukanlah tokoh politik praktis, tetapi lebih menonjol sebagai sosok seorang intelektual, pengamat dan pemerhati politik.¹²

Cara pandang Abdurrahman Wahid dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada di Indonesia bisa dibilang memiliki nuansa yang khas dan spesifik. Abdurrahman Wahid walaupun sangat kental mendapat pendidikan dari ilmu-ilmu klasik pesantren, namun ia mampu memasuki pemikiran modern dan bahkan sering berbagai pemikiran yang ia lontarkan terkesan sangat berwawasan jauh

¹⁰ Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, (Yogyakarta : Ar- Ruzz Jogjakarta, 2004) h. 74

¹¹ Ahmad Bahar, *Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Bina Utama Perkasatama Publishing, 1999), h. 13

¹² Faisal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, h. 49

kedepannya Walaupun terkadang banyak orang dibuat geleng kepala akibat sikap dan pemikiran Abdurrahman Wahid yang sering dibilang “nyeleneh”, namun Abdurrahman Wahid akan jalan terus dengan berbagai gagasan- gagasannya itu.¹³

Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hubungan agama dan negara sangat menarik, karena berada di ranah filosofis. Artinya Abdurrahman Wahid ternyata bukan seorang ideologi Islam yang mencitakan terbentuknya masyarakat Islami secara total. Bukan pula kaum sekuler yang hendak memisahkan antara Islam dan negara. Akan tetapi Abdurrahman Wahid adalah seorang muslim yang mendasarkan kemanfaatan paling mendasar dari politik, yakni kesejahteraan manusia, dari sumber-sumber keislaman. Dengan demikian secara esensial, Abdurrahman Wahid tidak memisahkan Islam dari politik meskipun politik tersebut tidak harus berbentuk negara Islam.¹⁴ Abdurrahman Wahid menyatakan: Tidak adanya bentuk baku sebuah negara dan proses oemindahan kekuasaan dalam bentuk tetap yang ditinggalkan Rasulullah Muhammad SAW, baik melalui ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis, membuat perubahan historis atas bangunan negara yang ada menjadi tidak terelakkan atau tercegah lagi. Dengan kata lain, kesepakatan akan bentuk negara tidak dilandaskan pada dalil naqli tetapi pada kebutuhan masyarakat pada suatu waktu.

Pada konsep Islam tentang negara, yang diperdebatkan oleh beberapa pemikir dan yang lainnya. Banyak diajukan pemikiran tentang negara Islam, yang berimplikasi pada orang yang tidak menggunakan pemikiran itu maka dinilai telah meninggalkan Islam. Disini Abdurrahman Wahid beranggapan bahwa, Islam sebagai jalan hidup (syari’ah) tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. Karena sepanjang hidupnya, Abdurrahman Wahid telah mencari dengan sia- sia makhluk yang dinamakan Negara Islam itu. Sepanjang hidupnya ia belum menemukannya, jadi tidak salah jika disimpulkan memang

¹³ Ahmad Bahar, *Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid*, h. 14

¹⁴ Syaiful Arif, *Humannisme Gus Dur Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) h. 151

Islam tidak memiliki konsep bagaimana negara harus dibuat dan dipertahankan.

Dasar jawaban itu adalah tiadanya pendapat yang baku dalam dunia Islam tentang dua hal. Pertama, Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian pemimpin. Rasulullah SAW digantikan Abu Bakar tiga hari setelah beliau wafat melalui bai'at atau prasetya.

Kedua, besarnya negara yang dikonsepsikan menurut Islam, juga tidak jelas ukurannya. Nabi meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan bagi kaum muslimin. Dari gagasan diatas dapat disimpulkan bahwa Negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual, dan tidak diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Ia pun hanya dipikirkan oleh sejumlah orang pemimpin yang terlalu memandang Islam dari sudut institusional belaka. Ada tiga pilar pemikiran Abdurrahman Wahid : (1) keyakinan bahwa Islam harus secara aktif dan substansif ditafsirkan ulang atau dirumuskan ulang agar tanggap terhadap tuntutan kehidupan modern, (2) keyakinannya bahwa, dalam konteks Indonesia, Islam tidak boleh menjadi agama negara, dan bahwa (3) Islam harus menjadi kekuatan yang inklusif, demokratis dan pluralis, bukan ideologi negara yang eksklusif.

b. **Perjalanan Politik Abdurrahman Wahid**

Sepulang dari luar negeri pada tahun 1971, Abdurrahman Wahid kembali ke Jombang dan menjadi guru di Pesantren Tebuireng, dan pada tanggal 11 September 1971, pasangan antara Abdurrahman Wahid dan Nuriyah melangsungkan pesta resepsi perkawinan mereka. Dan dari hasil perkawinannya mereka dikaruniai empat orang putri. Mereka adalah Alissa Qotrunnada Munawarah, Syarifah Zanuba Absah, Anita Chayatunnufus, dan Inayah Wulandari.¹⁵

Pada tahun 1974 sampai 1980 ia ditunjuk oleh pamannya HM. Yusuf Hasyim untuk menjadi Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng. Pada tahun yang sama Abdurrahman Wahid mulai menjadi penulis diberbagai surat kabar, majalah, dan jurnal. Dalam tulisan-

¹⁵ Syamsul Hadi, *K.H. Abdurrahman Wahid Guru Bangsa, Bapak Pluralisme*, h.17

tulisannya, Abdurrahman Wahid mengembangkan gaya bahasa yang menggabungkan bahasa harian dan humor dengan topik yang serius. Dalam periode ini pula ia mulai terlibat secara teratur dalam kepengurusan NU dan mengajar di beberapa sekolah lainnya.¹⁶

Pada tahun 1977 ia dipercaya sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin di Bidang Praktek dan Kepercayaan Islam di UNHASY (Universitas Hasyim Asy'ari) Tebuireng, juga sebagai Sekretaris Pondok Tebuireng, saat itu beliau sudah mulai menjadi penulis, lewat tulisan-tulisannya pemikiran Abdurrahman Wahid mulai mendapat perhatian banyak orang.¹⁷

Pada awal tahun 1980 Abdurrahman Wahid menjadi Sekretaris Syuriah PBNU. Disini beliau terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial dan politik. Pada saat itu pemerintah masih takut akan sikap oposisi dari organisasi muslim terbesar ini. Akibatnya, NU terjebak dalam hubungan yang antagonis dengan pemerintah. Akan tetapi pada akhirnya Abdurrahman Wahid mampu mendesain penerimaan asas tunggal dari kalangan NU.¹⁸ Mulai sejak saat itu hubungan antara NU dan pemerintah mulai agak cair.

Disamping kesibukannya di NU, pada awal kedatangannya di Indonesia, Abdurrahman Wahid juga mulai memperluas jaringannya dengan dunia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan beberapa tokoh. Sejak saat itu pikiran-pikiran dan tindakan Abdurrahman Wahid menjadi sesuatu yang fenomenal di Indonesia. Keberaniannya

Menentang arus tindakan masyarakat yang tidak sesuai dengan gagasan dan pikirannya serta kesetiannya pada gagasan, komitmennya pada Islam dan nilai-nilai kebangsaan menjadikan ia sebagai tokoh yang populer dan disegani sekaligus dimusuhi dan dicaci hingga saat ini.

¹⁶ Ali Yahya, *Gus Dur di Mata Adik-Adiknya*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2010) h. 21

¹⁷ Mubarak dan Fathurrahman Karyadi, "*Biografi Singkat*", A.M.Y. Spe (Editor), *Gus Dur di Mata Keluarga dan Sahabat*, h. 10

¹⁸ Ali Yahya, *Gus Dur di Mata Adik-Adiknya*, h. 22

Pada awal reformasi membuat Abdurrahman Wahid tak menyia-nyiakan kesempatan untuk segera terjun ke dunia politik. Maka ia pun mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini dimaksudkan sebagai wadah Nahdhiyin. Meskipun ia mengatakan bahwa partai ini adalah partai terbuka, bukan hanya untuk kalangan NU. Peran Abdurrahman Wahid dalam perpolitikan di PKB begitu besar, karena dengan ketokohan Abdurrahman Wahid ia mampu membesarkan PKB. Sepertinya jika tanpa adanya Abdurrahman Wahid mungkin PKB tak akan tumbuh dan berkembang dengan pesat. Bayang- bayang Abdurrahman Wahid dalam visi, misi dan perilaku politik PKB sangat dominan. Abdurrahman Wahid sangat mempengaruhi gerak langkah PKB dipentas percaturan politik nasional sejak partai ini berdiri.¹⁹

Sejak PKB didirikan pada bulan juli 1998, banyak dari anggota partai ini yang berharap bahwa Abdurrahman Wahid akan menjadi Presiden. Paling tidak mereka mempunyai hak untuk mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Pada tanggal 7 Februari 1999 akhirnya Ketua Umum PKB, mengumumkan bahwa PKB akan

Mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Abdurrahman Wahid menjadi Ketua Dewan Syuro pertama partai tersebut.²⁰

Pada tanggal 20 Oktober 1999, dalam pemilihan Presiden di gedung DPR-MPR, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Indonesia yang ke empat dengan 373 suara. Reformasi pertama yang dilakukan Abdurrahman Wahid adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media, dan membubarkan Departemen Sosial yang korup. Abdurrahman Wahid juga memberikan keistimewaan menerapkan syariat Islam kepada rakyat Aceh. Pada Desember, Abdurrahman Wahid mengunjungi Jayapura dan merubah nama provinsi Irian Jaya menjadi Papua. Tak heran jika kini Abdurrahman Wahid diberi

¹⁹ Faisal Ismail. *NU Gusdurisme Dan Politik Kiai*, h. 144

²⁰ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 324

gelar sebagai “ Bapak Orang Papua” oleh masyarakat Papua.²¹

Selama menjabat sebagai Presiden, banyak langkah yang telah dilakukannya untuk mencoba mengubah keadaan negeri ini dan memberikan ruang kebebasan yang demikian luas, langkah-langkahnya banyak menimbulkan kontroversi. Banyak orang, baik yang pro maupun yang kontra terhadapnya, yang tak dapat memahami tindakan-tindakannya. Pada akhir November tahun 2000, 151 DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Abdurrahman Wahid.

Pada 1 Februari 2001, DPR bertemu untuk mengeluarkan Nota terhadap Abdurrahman Wahid. Nota tersebut berisi diadakannya sidang khusus MPR dimanapemakzulan Presiden dapat dilakukan. Akhirnya pada 23 juli 2001, MPR resmi memakzulkan Abdurrahman Wahid dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri. Setelah berhenti dari jabatannya, Abdurrahman Wahid tetap berjuang dan tetap lantang menyuarakan kebenaran. Sebenarnya sudah lama Abdurrahman Wahid menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden. Beberapa kali Abdurrahman Wahid mengalami serangan stroke, diabetes dan ginjal. Namun ia selalu bilang sehat-sehat saja kepada semua orang yang menemuinya.

Pada pemilihan presiden tahun 2004, PKB memilih Abdurrahman Wahid menjadi Presiden kembali. Namun Abdurrahman Wahid dijegal dengan peraturan KPU tentang kesehatan calon. Pada agustus 2005, Abdurrahman Wahid menjadi salah satu pemimpin koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, terutama mengenai pencabutan subsidi BBM yang akan menyebabkan naiknya harga BBM dan kebutuhan pokok.

Pada tanggal 23 Desember 2009, Abdurrahman Wahid mengunjungi teman akrabnya, K.H. Mustafa Bisri di Rembang Jawa Tengah, lalu melanjutkan ke Jombang untuk ziarah ke kakeknya, K.H. Wahab Hasbullah. Karena,

²¹ A. Mubarak dan Fathurrahman Karyadi, “*Biografi Singkat*”, A.M.Y. Spe (Editor), Gus Dur di Mata Keluarga dan Sahabat, h. 21

kelelahan kondisi fisik Abdurrahman Wahid drop sehingga harus dirawat di RSUD Swadana Jombang. Setelah agak membaik, Abdurrahman Wahid Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Hari rabu, 30 Desember 2009, kondisi Gus Dur dinyatakan kritis pukul 11.00 WIB. Kondisinya memburuk akibat komplikasi penyakit ginjal dan diabetes yang di deritanya. Pada pukul 18.45 WIB Sesuai keterangan dokter, Abdurrahman Wahid menghembuskan nafas terakhir.

Kepergian tokoh besar Indonesia ini bukan saja menyedot perhatian masyarakat di tanah air, namun juga mengejutkan dunia Internasional. Mantan Presiden RI ke 4 itu banyak menyisakan sejuta kenangan dikalangan teman, politisi, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia maupun di dunia.²²

4. Pengertian Negara

Kata *state* adalah beberapa terjemahan kata serapan dari *State* (Inggris), *Staat* (Belanda dan Jerman), atau *Etat* (Prancis). Dengan kata lain, negara dicirikan sebagai kumpulan perkumpulan yang paling penting yang ingin bergabung bersama, tinggal di suatu daerah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Nilai konfigurasi khusus untuk negara berdaulat, rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat termasuk dalam definisi ini.²³

Negara, menurut ahli teori pendiri K.H. Abdurrahman Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosurojo, hanyalah alat untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Demikian pula, norma-norma Islam yang ketat (asy-shari'ah) diharapkan dapat membantu seluruh kehidupan manusia, tidak peduli ras, agama atau golongan.

Dengan menegakkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para ulama pendiri mencapai pluralisme agama dan merumuskan kebijakan yang sejalan dengan tujuan semua kelompok agama. Oleh karena itu, wajar jika falsafah negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila dipandang sebagai sistem kepercayaan

²² A. Mubarak dan Fathurrahman Karyadi, "Biografi Singkat", A.M.Y. Spe (Editor), Gus Dur di Mata Keluarga dan Sahabat, h. 24

²³ A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *pendidikan kewarganegaraan civil education (pancasila, demokrasi, HAM dan masyarakat Madani)*, (Jakarta, Penadamedia Group) h. 120

yang paling utama, karena pemikiran tersebut berangkat dari adat-istiadat dan jiwa keras warganya. Setelah Nahdlatul Ulama mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara pada kongres di Situbondo, Jawa Timur, tahun 1984, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi Pancasila memperoleh kekuatan kultural.²⁴

Teori pemikiran Barat muncul pada abad SM. Pemikir Yunani seperti Sokal, Plato, dan Aristoteles semuanya mengajarkan teori negara. Dalam sejarah Islam, teori negara sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Diterapkan secara eksplisit. ketertiban nasional. Pemahaman ini sekarang berkembang, karena yang disebut negara hanya mencakup komunitas kecil atau negara kota atau yang disebut negara kota, jadi, bahasa apa negara itu? Negara mereka memiliki banyak definisi.²⁵

a. Roger H. Soltau:

Negara adalah badan atau otoritas yang mewakili dan mengatur atau mengendalikan urusan (umum) ini atas nama rakyat.

b. Harold J.Lasky:

Negara adalah masyarakat yang komprehensif karena memiliki kewenangan memaksa dan secara hukum lebih kuat dari individu atau kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai suatu keinginan bersama. Suatu masyarakat adalah negara jika cara hidup yang harus dipatuhi oleh individu dan kelompok ditentukan oleh otoritas yang memaksa dan mengikat..²⁶

c. Max Weber

Negara adalah masyarakat yang memonopoli penggunaan kekuatan fisik secara legal di dalam wilayahnya.

d. Robert M McIver:

Negara adalah organisasi yang mengatur masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, yang memberikan kewenangan

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 307-308; Ismail, *Islam and Pancasila*, h. 51 dan 55.

²⁵ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 48.

²⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 49

kepada negara untuk memenuhi kepatuhan tersebut. Negara adalah kelompok yang bertindak melalui undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Undang-undang ini memberi kekuatan koersif negara dan menyediakan kondisi eksternal umum yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial dalam komunitas territorial

Dapat ditarik kesimpulan bahwa negara adalah suatu wilayah teritorial yang warganya diperintah oleh pejabat-pejabat yang berhasil menegakkan hukum dan peraturan-peraturan terhadap warganya berkat adanya kontrol monopoli atas kekuasaan yang sah.²⁷

Negara secara teoretis adalah masyarakat sintetik karena negara memiliki kekuatan koersif yang sah atas anggota kelompok atau individu masyarakat tersebut. Pandangan lain adalah bahwa negara adalah wilayah yang warganya diperintah oleh sekelompok kecil pejabat atau yang berhasil memaksakan kontrol kekuasaan pada warganya. Pada saat yang sama, bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan nilai dan ingin membentuk pemerintahan di tanah yang sama.²⁸

5. Negara dalam Pandangan Islam

Negara dalam konsep Islam yaitu.²⁹

a. Daulah (selamat tinggal)

Kata daulah berasal dari kata arab daulah, dan kata daulah berasal dari dalayadulu-daulah yang berarti poros, penyebaran, revolusi, perputaran, atau periodisitas (periodisitas saling terkait). Istilah ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok sosial yang hidup di suatu wilayah tertentu dan diperintah oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingannya sendiri. Istilah tersebut bisa merujuk pada perkumpulan yang menempati suatu wilayah dan diwakili oleh suatu pemerintahan yang menguasai kepentingan dan keuntungan. Olaf Schuman, di sisi lain, percaya bahwa kata "daulah" mengacu pada dinasti atau dinasti—sistem kekuasaan yang memuncak pada seseorang yang didukung oleh keluarga atau klannya.

Lagi pula, kata Azra, daulah itu unik dalam kaitannya dengan gagasan kekuasaan atau negara negara

²⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 51

²⁸ Azyumardi Azra, *Relevansi Islam Wasathiyah*, h. 26.

²⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2010), h. 13-15

dalam pemahaman yang mutakhir. Jelaslah bahwa konteks kedua komentar ini berbeda satu sama lain. Tujuan awal dari komentar tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa daulah memiliki arti yang sama dengan bangsa atau negara. Azra mengungkapkan bahwa dalam kaitannya dengan nusantara Islam, Daura adalah kekuatan langsung penguasa, mulai dari ketuhanan Tuhan, mengawasinya dengan kekuatan dunia lain dan kekuatan abadi.³⁰

b. Khilafah

Khilafah berarti agen, pengganti, atau kedudukan khilafah. Kata Arab khlf, yang berarti wakil, penerus, dan penguasa, adalah akar dari kata tersebut. Khilafah didasarkan pada dua pilar, konsensus elit politik (ijma') dan pemberian legitimasi (bay'ah), dari perspektif politik Sunni.³¹

Percakapan Khilafah dalam bahasa sangat erat hubungannya dengan susunan kata (bawahan). Kata khilafah memiliki akar kata yang mirip dengan khalifah (mufrad), khalaiif (jama') dan khulafa' (jama'). Timbal balik ini berasal dari akar kata (fi'il madi) kholafa (خلف). Istilah "khalifah", yang berarti "perwakilan", "penerus", "penguasa", atau "khalifah" dalam ensiklopedia pertama Islam, mengacu pada orang yang menggantikan nabi sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Kepentingan terakhir ini sesuai dengan Al-Maudidi, khalifah yang merupakan kepala terkemuka dari usaha yang ketat dan dunia, menggantikan para rasul.³²

c. Hukumah

Pemerintahan disebut yurisprudensi. Itu diucapkan Hukumet dalam bahasa Persia. Istilah "negara" tidak sama dengan yang ini. Selain itu, hukuman berbeda dari khilafah dan imamah. Karena hukuman lebih terkait erat dengan struktur pemerintahan daripada kedua konsep ini dengan politik atau bentuk kekuasaan. Pelaksanaan atau demonstrasi tugas gubernur, lamanya masa jabatan

³⁰ Azyumardi Azra, *Relevansi Islam Wasathiyah*, h. 25.

³¹ Ma'shum, "Eksplorasi Islam dan Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Lembaga Politik Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Ash-Syir'ah*, vol. 47, tidak. 2 (Desember 2013), h. 2. 483

³² Ma'shum, *Islam dan Pencarian Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam*, h. 484

gubernur, atau peraturan yang mengatur kantor gubernur, semuanya merupakan sasaran umum sanksi..³³

d. Imamah

Menurut Mawardi, imam adalah khalifah, raja, sultan, atau kepala negara, sebagaimana dikemukakan Munawir Sjadzalin. Oleh karena itu, menurut Munaville, Mawardi, terlepas dari pakaian politiknya, memberkati kepala negara dengan koneksi yang ketat. Seorang khalifah dan seorang imam disamakan dengan Taqiyudin an-Nabhani. Sebab, menurutnya, Khalifah adalah pemimpin global yang menegakkan hukum syariah bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia dan di setiap wilayah..³⁴

e. Kesultanan

Istilah Kesultanan dapat diartikan sebagai kekuasaan. Menurut Lewis, kata tersebut muncul beberapa kali di dalam Al-Qur'an dan berarti kekuatan, terkadang bukti, lebih khusus kekuatan yang efektif, dan terkadang kata sifat mubin, otoritas yang kuat..³⁵

6. Hubungan Islam dan Negara

Hubungan ideal antara agama dan negara juga dijelaskan dalam firman Allah, kesempurnaan agama Islam jika dipahami dan diamankan secara utuh, (QS al-Baqarah [2]: 208).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا
 خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Masuklah Islam secara utuh dan janganlah kamu mengikuti jejak-jejak setan. Sesungguhnya dia adalah musuhmu yang sesungguhnya” (Q.S. Al Baqarah: 208).³⁶

Dalam Islam, politik diartikan sebagai pengelolaan urusan (kepentingan) orang-orang di dalam dan luar negeri menurut hukum Islam.

³³ Ma'shum, *Islam dan Pencarian Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam*, h. 485

³⁴ Ma'shum, *Islam dan Pencarian Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam*, h. 486 .

³⁵ Ma'shum, *Islam dan Pencarian Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam*, h. 486 .

³⁶ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, h. 102

a. Pengertian Teokrasi

Relasi agama dan negara dalam teokrasi digambarkan sebagai (2) hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena pemerintah bertindak sesuai dengan firman Tuhan, negara dikaitkan dengan agama. Kehendak Tuhan adalah sumber dari semua kehidupan dan institusi sosial, negara bagian dan masyarakat. Dipercayai bahwa peristiwa politik dan nasional adalah manifestasi dari firman Tuhan.³⁷

Perkembangan teokrasi dapat dibagi menjadi dua bagian: dua jenis teokrasi: langsung dan tidak langsung. Pemerintah dianggap sebagai otoritas langsung Tuhan dalam teokrasi langsung. Kehendak Tuhan menentukan keberadaan suatu bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, penguasa adalah Tuhan. Sebaliknya, dalam teokrasi tidak langsung, penguasa adalah raja atau kepala negara yang menjalankan otoritas (kekuasaan) atas nama Tuhan dan bukan Tuhan sendiri.³⁸

b. Paham Sekularisme

Kata sekuler secara konseptual dan etimologis berasal dari bahasa Latin *Seculum*, yang mulai digunakan selama Kekaisaran Romawi pada abad keempat Masehi. *Seculum* awalnya mengacu pada era atau era, yang mewakili masa hidup seseorang, kota, atau sekelompok orang. Istilah sekuler juga digunakan seabad kemudian.³⁹

Sekularisme memisahkan agama dari negara. Dalam pengertian ini, lembaga negara tidak ada hubungannya dengan agama. Negara adalah hasil interaksi manusia dengan orang lain atau isu-isu global. Hubungan manusia dengan Tuhan adalah agama. Sekularisme mengatakan bahwa kedua hal ini tidak dapat berjalan bersamaan. Dalam keadaan umum, kumpulan hukum dan standar umum jelas diisolasi dari kualitas dan standar yang ketat. Meskipun mungkin bertentangan dengan norma agama, norma hukum ditetapkan atas kesepakatan manusia dan tidak didasarkan pada agama atau firman Tuhan, seperti dalam teokrasi.⁴⁰

³⁷ Ahmad Sadzali, *Relasi Agama Dan Negara, Teokrasi, Sekuler, Tamyiz*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Juli 2018), h. 9

³⁸ Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara*, Jurnal Al Hikmah Vol. XV No. 2 (2014), h. 194

³⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik Jakarta*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 100

⁴⁰ Muhammad Hudaeri, *Sekularisme* h. 29

c. Komunisme

Agama dipandang sebagai kesadaran diri manusia sebelum menemukan dirinya, menurut ideologi komunis. Masyarakat negara adalah dunia manusia secara keseluruhan, yang merupakan kehidupan manusia. Agama, di sisi lain, adalah penderitaan kaum tertindas, sedangkan agama dipandang sebagai perwujudan kemanusiaan yang indah. Akibatnya, agama harus dibatasi atau bahkan dilarang, dan nilai tertinggi negara adalah harta benda. karena manusia pada dasarnya terbuat dari materi.⁴¹

Menurut Azzmardi Azra, hubungan antara agama dan negara masih menjadi hal yang umum di kalangan peneliti Islam, dimeriahkan oleh hubungan yang cukup tidak biasa antara Islam sebagai agama (raket) dan negara (daula). Sarjana tradisional berpendapat bahwa Islam adalah sistem kepercayaan di mana politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Islam memberikan sudut pandang dan makna bagi kehidupan individu, mengingat untuk domain politik. Dari perspektif ini, Islam pada dasarnya tidak mengizinkan pemisahan gereja dan negara. Last but not least, beberapa komentar dibuat mengenai gagasan hubungan antara negara dan agama. Berkaitan dengan persoalan negara dan pemerintahan serta asas-asas fundamentalnya, pandangan Islam tentang negara paling tidak mencakup tiga paradigma, yaitu:⁴²

a. Paradigma Sintetis

Menurut paradigma integrasi, yaitu integrasi Islam dan negara, konsep hubungan antara agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mereka adalah dua lembaga yang komprehensif. Ini jelas menunjukkan bahwa negara adalah institusi politik dan agama.⁴³

Pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan ketuhanan, atau dengan kata lain, paradigma menghendaki adanya negara Islam dalam bentuk negara teokratis, biasanya dengan mengukuhkan Islam (Syariah) sebagai

⁴¹ Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara*, h. 195

⁴² Azyumardi Azra, *Relevansi Islam Wasathiyah*, h. 26.

⁴³ Zulkifli, *Paradigma Hubungan Agama dan Negara*, *Jurnal Vol. 13, No. 2 (Desember 2014)*, h. 176

konstitusi negara, sedangkan model suksesi kepemimpinan seringkali terbatas dan tertutup.⁴⁴

Paradigma ini dianut oleh kaum Syi'ah, di mana paradigma pemikiran Syi'ah menganggap negara (istilah yang terkait adalah imam atau pemimpin) sebagai lembaga keagamaan dengan tujuan keagamaan. Dalam pemikiran Syiah, karena legitimasi agama berasal dari Allah dan diturunkan dari generasi ke generasi melalui Nabi Muhammad, legitimasi politik harus berakar pada agama, dan legitimasi agama hanya milik generasi Nabi. Paradigma politikai szunnita lebih kepatan pada ijma' dan kepatanan kepada kepala negara (khilafah), míg paradigma Syiah lebih ketakwaan pada ranah yang hanya mitiduli generasi ini (cinta dan ketakwaan kepada tuhan) dan ismah (kesucian) sebagai sebagai legitim. Dan Hukum Menjadi kepala negara (pendeta).⁴⁵

Sebagai lembaga politik yang persangat atas legitimasi agama dan memiliqi fungsi kijaya "kedaulatan Tuhan", negeri dalam persektrup Syi'ah bertabiat teokrasi. Negeri teokrasi memiliki faktor penafsiran kalau pudangan absolut tulak di tangan Tuhan serta constutti negeri bersumber pada pada wahyu Tuhan (syariah). Watak teokrasi bisa tebukana a pukkanan banyak ulama politikai Syi' ah, Khomaeni félig kalau kalau a negeri iszlám webangang sehke hukum tulak pada Tuhan. Tidak ada yang berhak membuat hukum, hanya hukum dari Tuhan yang bisa berlaku.⁴⁶

Namun, pemikiran politik Iran kontemporer adalah kombinasi dari Republik Islam Iran dan negara teokratis. Sistem negara Iran memang menunjukkan karakter demokrasi, yang tercermin dari penerapan prinsip pembagian kekuasaan berdasarkan prinsip politik triadik dan penggunaan istilah republik dari negara itu sendiri.⁴⁷

b. Paradigma Simbiosis

Menurut paradigma simbiosis, hubungan antara agama dan negara dipahami sebagai kebutuhan dan timbal

⁴⁴ Zulkifli, *Paradigma Hubungan Agama dan Negara*, h. 177

⁴⁵ Zulkifli, *Paradigma Hubungan Agama dan Negara*, h. 178

⁴⁶ Zulkifli, *Paradigma Hubungan Agama dan Negara*, h. 177.

⁴⁷ Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara*, Jurnal Al Hikmah Vol. XV No. 2 (2014), h. 199.

balik. Agama membutuhkan negara sebagai alat untuk memelihara dan mengembangkan agama. Begitu pula sebaliknya, bangsa membutuhkan agama karena agama juga membantu bangsa mengembangkan moral, etika dan spiritualitas. Agama dan negara adalah dua identitas yang berbeda. Konstitusi yang berlaku di alam semesta ini membutuhkan baik kontrak sosial maupun hukum agama yang dikenal sebagai syariah.⁴⁸

c. Paradigma sekuler

Paradigma sekuler adalah istilah untuk sistem kepercayaan yang dominan di sebagian besar dunia. Membicarakan hubungan antara agama dan negara di Indonesia merupakan pertanyaan yang menarik untuk dibahas, bukan karena penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, melainkan karena permasalahan yang muncul yang menjadi perdebatan di antara beberapa ahli. Penggambaran kontroversial tentang hubungan antara agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam.⁴⁹

Agama dan negara adalah dua struktur yang unik dan masing-masing memiliki bidang kerjanya sendiri. Jadi realitas mereka harus diisolasi dan tidak boleh memediasi satu sama lain mengingat pemahaman yang dikotomis ini. Oleh karena itu, hukum yang sebenarnya merupakan hasil kesepakatan manusia adalah hukum positif yang berlaku. Fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam tidak menjadikan hubungan agama dan negara di Indonesia menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan; Sebaliknya, isu-isu yang muncul menjadi bahan perdebatan di antara sejumlah pakar. Catatan diskusi tentang hubungan antara agama dan negara ini didorong oleh hubungan yang agak abnormal antara Islam.⁵⁰

Sebagai agama (din) dan negara (dawlah), agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baik itu institusi politik maupun institusi keagamaan. Untuk

⁴⁸ Achmad Yasin, *Pemetaan Pemikiran Islamic State, Khilafah Dan Nation State Perspektif Fiqh Al-Siyasi, Al-Daulah*, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol. 2, No. 2, Oktober 2012, 170

⁴⁹ Masykuri Abdillah, *Hubungan Agama dan Negara*, Jurnal yang berjudul Ahkam, Vol. XIII No. 2, Juli 2013, h. 10

⁵⁰ Masykuri Abdillah, *Hubungan Agama dan Negara*, h. 11

menggali lebih dalam pertanyaan ini, hubungan antara agama dan negara dapat dibagi menjadi dua jenis.⁵¹

- a. Hubungan antara agama dan negara bersifat antithesis (atagonistik).

Disparitas antara agama dan negara dianggap oleh pandangan dunia sekuler ada secara terpisah. Keyakinan ini diyakini sebagai gangguan; itu menyatakan bahwa agama dan negara tidak boleh tumpang tindih ruang kerja mereka. Hubungan permusuhan adalah inti dari hubungan dan menandai ketegangan antara negara dan Islam. Misalnya, pada masa kemerdekaan hingga revolusi politik, Islam dipandang sebagai pesaing kekuasaan yang dapat meruntuhkan fondasi negara. Disparitas antara agama dan negara dianggap oleh pandangan dunia sekuler ada secara terpisah. Keyakinan ini diyakini sebagai gangguan; itu menyatakan bahwa agama dan negara tidak boleh tumpang tindih ruang kerja mereka.

Negara dan agama keduanya memiliki fungsi yang terpisah. Mereka tidak boleh tumpang tindih dalam bidang pekerjaannya masing-masing karena kepercayaan pada pemahaman yang dikotomis. Sebaliknya, hukum positif diciptakan melalui konsensus di antara manusia. Oleh karena itu, asumsi ini menyiratkan bahwa negara mau berusaha membatasi dan memaksakan domestikasi ideologi politik Islam. Karena pada tahun 1945-an dan 1950-an, ada dua kubu ideologi yang memperebutkan negara Indonesia, yaitu gerakan Islam dan gerakan nasionalis.⁵²

Di Indonesia, sumber konfrontasi antara Islam dan hubungan politik antar negara tidak lepas dari konteks di mana perbedaan agama menggambarkan tren. Asal usul persaingan ini dapat ditelusuri kembali ke periode gerakan nasionalis, ketika elit politik negara memperdebatkan peran Islam di Indonesia merdeka. Upaya untuk menciptakan kemungkinan yang kompleks antara Islam dan negara berlanjut hingga masa kemerdekaan dan pasca-revolusioner. Meskipun upaya mencari jalan keluar dari

⁵¹ Rosmaniah Hamid, *Pemikiran Islam tentang Hubungan Agama dan Negara*, Makalah 2011, h. 4.

⁵² Sirajuddin, *Perda Berbasis Agama Rajawali Pers*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), h. 9.

ketegangan ini pada awal 1970-an, beberapa aktivis Islam masih mengembangkan legalisme, formalisme, dan simbolisme selama 20 tahun pertama pemerintahan Orde Baru (sekitar 1967-1987).⁵³

Hubungan antara agama dan negara saat ini disebut sebagai hubungan oposisi, dan negara memang mencurigai Islam sebagai kekuatan potensial untuk melawan keberadaan negara. Di sisi lain, umat Islam saat itu memiliki semangat atau semangat yang luhur dan menggunakan Islam sebagai sumber ideologis pemerintahan yang berkuasa.

b. Hubungan inklusif (inklusif)

Rekonsiliasi adalah inti dari hubungan yang saling menguatkan antara bangsa dan agama, bahkan ada beberapa kesamaan untuk mengurangi kecenderungan konflik. Menyadari bahwa umat Islam adalah kekuatan politik yang potensial, pemerintah memeluk Islam. Jika Islam ditempatkan di luar negara, konflik tidak akan terhindarkan dan pada akhirnya akan mempengaruhi negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak pertengahan 1980-an, ada tanda-tanda bahwa hubungan Islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih inklusif dan terintegrasi.⁵⁴

Perihal ini diisyaratkan dengan terus menjadi dilonggarkannya wacana politik Islam dan dirumuskannya beberapa kebijakan yang dikira positif oleh sebagian besar warga Islam. Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas, terdapat yang bertabiat:

- 1) Struktural, ialah dengan terus menjadi terbukanya peluang untuk para aktivis Islam buat terintegrasikan ke dalam negeri.
- 2) Legislatif, misalnya disahkannya beberapa undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam.
- 3) Infrastruktural, ialah dengan terus menjadi tersedianya infrastruktur infrastruktur yang dibutuhkan umat Islam dalam melaksanakan tugas-tugas keagamaan.

⁵³ Rosmaniah Hamid, *Pemikiran Islam tentang Hubungan Agama dan Negara*, h. 5

⁵⁴ Sirajuddin, *Perda Berbasis Agama Rajawali Pers*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), h. 12

- 4) Kultural, misalnya menyangkut akomodasi negara terhadap Islam yaitu menggunakan idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara.⁵⁵

Sepanjang sejarah Orde Baru, hubungan Soeharto dengan politik Islam mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Namun, harus diakui bahwa Suharto dan kebijakannya memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan sifat hubungan antara negara Indonesia dan Islam politik. Alasan negara-negara mengakomodasi Islam: Pertama, karena Islam merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, hal itu menimbulkan persoalan politik yang cukup kompleks. Kedua, di lingkungan pemerintahan, ada beberapa orang yang tidak terlalu takut dengan Islam, bahkan memiliki landasan Islam yang kuat karena latar belakang mereka. Ketiga, konsep, sikap dan orientasi politik Islam itu sendiri telah berubah.⁵⁶

Pada saat yang sama, menurut Bakhtiar, alasannya adalah umat Islam telah mengalami proses mobilisasi sosial-ekonomi-politik yang signifikan selama dua puluh lima tahun terakhir, menambah pergeseran pemikiran dan perilaku politik generasi baru Islam. Hubungan antara Islam dan negara berawal dari hubungan permusuhan dan lambat laun menjadi harmonis. Sikap toleran ini muncul ketika umat Islam Indonesia saat itu dianggap semakin sadar akan kebijakan negara, terutama yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Bahkan, kompleks yang mungkin dapat dibuat antara Islam dan negara. Ekspresi legalisme dan formalisme dalam pemikiran dan praktik politik Islam menimbulkan ketegangan antara Islam dan negara.⁵⁷

Pada saat yang sama, wacana intelektualisme Islam substantif dan aktivisme politik yang dikembangkan oleh generasi baru Islam merupakan modal dasar untuk membangun kompleks Islam.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan referensi. Juga, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Untuk menemukan kebaruan dalam penelitian ini dan untuk mendukung dan penelitian lebih lanjut seperti yang

⁵⁵ Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara*, h. 200

⁵⁶ Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara*, h. 201 .

⁵⁷ Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara*, h. 202.

dijelaskan di atas, penulis berusaha untuk terlebih dahulu meneliti sumber data perpustakaan yang ada, seperti buku dan jurnal. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Penelitian Greg Fearly dan Greg Berton menganggap buku tersebut memuat penjelasan atau arah pembahasan yang mendetail, menyoroti penelitian mereka tentang ekspresi ide-ide politik utama Abdurrahman Wahid, di samping pembahasan yang lebih mendalam tentang terjemahan Ulama yang terkandung dalam buku tersebut. memahami. Ilmu di bidang Islam, yang tugasnya memberi nasehat untuk kemaslahatan generasi masa depan umat manusia. Oleh karena itu, buku tentang pemikiran politik Abdul Rahman Wahid ini sangat berharga sebagai referensi makalah penulis karena sesuai dengan judul makalah penulis.

Penelitian oleh Greg Barton, Biografi Abdurrahman Wahid Judul asli: “Authorized Biography of Abdurrahman Wahid”. Terj, Lie Hua (2002) membahas perjalanan hidup Abdurrahman Wahid dari kecil hingga dewasa dan perlawanannya terhadap rezim Orde Baru (Orba), serta menjelaskan kebijakan yang dibawa oleh Republik Indonesia. Biografi yang ditulisnya, Greg Barton sendiri berkaitan erat dengan Abdul Rahman Wahid, sehingga terkesan tidak objektif. Namun, inilah yang menarik citra Abdurrahman Wahid dalam biografi Greg Barton. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, penelitian penulis tepat untuk memberikan penulis referensi dan referensi untuk menyelesaikan diskripsi ini.

Jurnal Penelitian Lisna Alvia, 2015, berjudul “Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Politik Partai (PKB) di Era Pasca Reformasi 1998-2009”. Pancasila, mengatur hubungan agama dan politik serta arah dan praktik politik. dan bertujuan untuk mengetahui posisi Abdurrahman Wahid dalam hal kekuasaan dan pengaruh. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa tidak hanya aspek agama, tetapi aspek demokrasi dan sosial budaya tidak erat kaitannya dengan status ulama.

Buku Abdurrahman Wahid 2009 “*The Prism of Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Thought*”, karya K.H. Abdurrahman Wahid membahas pemikiran sosial politik Abdurrahman Wahid.⁵⁸

Jurnal penelitian Ali Masykur Musa tahun 2010 berjudul “Pemikiran dan Sikap Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur)”.

⁵⁸ Hairus Salim & Greg Barton, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 5.

Kajian ini mengeksplorasi signifikansi praktis pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pendidikan moral. Pendidikan akhlak tidak dapat dipisahkan dari kategori pendidikan Islam. Pendidikan akhlak yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan akhlak merupakan titik tertinggi dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Motivasi penelitian ini adalah turunnya nilai moral sebagian besar remaja, dewasa atau orang tua baik di pedesaan maupun di perkotaan. Buku ini menggambarkan perjalanan politik K.H. Abdurrahman Wahid dan alasannya.

C. Kerangka Berpikir

Bagaimana kerangka mental sebagai model konseptual menjelaskan hubungan antara teori dan berbagai faktor merupakan pertanyaan penting. Untuk memperjelas alur kerangka penelitian, dapat dilihat pada kerangka berikut:

1. Islam Menurut Pandangan Abdurrahman Wahid

- a. Islam di Indonesia menurut Abdurrahman Wahid adalah Islam yang khas, Islam yang memiliki budaya tersendiri yang berbeda dan tidak dapat dipaksakan mengikuti konteks masyarakat di mana Islam dilahirkan. Antara Islam dan varian-varian lokalitas di Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai, dan masyarakat akan hidup dalam tatanan yang lebih tenang apabila nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan tanpa merusak tata hubungan dengan masyarakat lain yang berbeda secara keyakinan, suku, ras dan strata sosial, sehingga teologi kontekstual Abdurrahman Wahid lebih diarahkan untuk berbicara masalah HAM (Hak Asasi Manusia) dan pembelaan terhadap kaum minoritas.⁵⁹
- b. Agama Islam dipandang Abdurrahman Wahid sebagai salah satu elemen yang penting dalam kehidupan sosial. Karena agama mengandung ajaran yang menanamkan nilai-nilai sosial. Apabila nilai-nilai itu meresap dalam pikiran sebagian besar masyarakat (penganut), maka ajaran-ajaran agama tersebut menjadi salah satu elemen yang membentuk *cultural value system* (sistem nilai budaya) atau *value orientation* (orientasi nilai). Keberagaman agama biarlah menjadi perbedaan akan tetapi kemajemukan masyarakat ini harus disamakan dalam sikap humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun Abdurrahman Wahid mengedepankan rasa kemanusiaan dan toleransi, namun

⁵⁹ Greg Barton, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, h. 7

aqidah yang dipegang haruslah jelas. Setiap agama menjalankan aqidahnya masing-masing, akan tetapi hubungan ikatan antar agama harus terjalin dengan baik.

- c. Menurut Abdurrahman Wahid, Islam adalah agama kasih sayang, agama toleran, agama keadilan dan sekaligus agama kejujuran. Artinya, Islam adalah keyakinan yang egaliter, yang secara fundamental tidak mendukung perlakuan zalim, karena alasan agama, suku, ras, gender, status sosial atau pengelompokan-pengelompokan lainnya dalam masyarakat. Bagi Abdurrahman Wahid, Islam adalah keimanan yang mengakui bahwa dalam pandangan Tuhan, semua manusia adalah setara, bahkan status muslim dan non muslim pun setara.
- d. Pandangan Abdurrahman Wahid tentang Islam tersebut oleh Greg Barton disejajarkan dengan prinsip dasar Eropa Kristen dan Yahudi di abad Pencerahan. Abdurrahman Wahid menghayati Islam sebagai agama yang menuntut sikap toleran dan besar hati terhadap agama lain. Dari pernyataan di atas seakan-akan Abdurrahman Wahid ingin menyatakan bahwa seluruh agama, secara formalitas peribadatan memiliki perbedaan, pada hakikatnya hanya ingin membentuk sosok al-insan al-kamil (manusia paripurna) yang memiliki akhlaq al karimah (moralitas).⁶⁰

2. Negara Menurut Pandangan Abdurrahman Wahid

- a. Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa gagasan negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual dan tidak diikuti oleh mayoritas umat Islam. Gagasan tersebut hanya dipikirkan oleh sejumlah orang saja yang terlalu memandang Islam dari sudut pandang institusionalnya belaka. Karena lebih dari itu, Islam menyuguhkan nilai-nilai yang merupakan ruh dari seluruh sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- b. Menurut Abdurrahman Wahid konsep negara Islam tak pernah ada. Islam hanya menyuguhkan nilai-nilai luhurnya untuk mengisi setiap sendi perpolitikan, perekonomian, kebudayaan, seni, dan lain-lain. Bahkan, menurut Abdurrahman Wahid gagasan negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual dan tidak diikuti oleh mayoritas umat Islam. Gagasan tersebut

⁶⁰ Greg Barton, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, h. 8

hanyalah dielu-elukan oleh sekelompok muslim yang memandang dari sudut pandang institusionalnya.⁶¹

- c. Dalam bukunya yang berjudul *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (2006), Abdurrahman Wahid mendedah historis, bentuk kepemimpinan yang dipraktikan oleh umat Islam. Di mulai dari setelah wafatnya Rasulullah Saw, maka tampuk kepemimpinan dipegang oleh para khalifah (pengganti rasul). Khalifah pertama yakni Sayyidina Abu Bakar yang diangkat melalui sistem prasetia/baiat dari para kepala suku atau wakil-wakilnya untuk melebur pada Abu Bakar. Khalifah kedua yakni Sayyidina Umar Bin Khattab di dapuk pemimpin pasca wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Dalam pemilihan Sayyidina Umar Bin Khattab, diberlakukan sistem ahlul halli wal qodhi (elector). Khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan memimpin oleh karena permintaan Sayyidina Umar di akhir masa hidupnya sesaat pasca dihunus sebilah pisau beracun oleh Abu Lu'luah. Sedangkan khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan Sayyidina Utsman Bin Khattab, dan berlanjut ke sistem kerajaan (monarki). Bentuk-bentuk pengangkatan pemimpin yang berubah-ubah, bagi Gus Dur adalah sebuah bukti atau boleh dikatakan Islam tak mengenal konsep negara. Oleh sebab itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia sejatinya adalah negara yang sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun dasar dari negara Indonesia bukan Al-Qur'an dan Hadits, yakni Pancasila. Yang mana Pancasila dibentuk atas representasi nilai-nilai Islam. Seluruh sila dalam Pancasila memuat nilai-nilai: ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, persamaan, kebebasan, persaudaran, keberagaman dan lain sebagainya.⁶²
- d. Dalam buku kumpulan *Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser* (2002), Abdurrahman Wahid menguraikan bahwa pengertian negara dari kata *daulah* tidak dikenal Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, kata tersebut (di Al-Qur'an dibaca *duulatan*) bermakna berputar atau beredar, yang terdapat pada Surat Al-Hasyr ayat 7: "*agar harta yang terkumpul itu tidak berputar/beredar antara orang-orang kaya saja di lingkungan Anda semua*".

⁶¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, h. 96

⁶² Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, h. 97